



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu untuk keberkahan hartanya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk lebih efektif dan terarah pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Sijunjung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab. Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
17. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota se-Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 disisip 1 (satu) angka yakni angka 1a, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisip 1 (satu) angka yakni angka 6a, di antara angka 9 dan angka 10 disisip 1 (satu) angka yakni angka 9a, angka 14, angka 15, angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;

- 1a Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung;
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah BAZNAS Kabupaten Sijunjung, yaitu Organisasi Pemerintah Non Struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 6a. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Sijunjung;
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung dengan tugas mengumpulkan zakat dan melayani muzaki yang berada pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Lembaga-lembaga Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Nagari/desa, Jorong, Sekolah, Masjid, dan lembaga-lembaga keagamaan;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya;
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoptimalisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- 9a Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam;
- 10 Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 11 Muzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban membayar zakat;
- 12 Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
- 13 Agama adalah agama Islam;
- 14 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 15 Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau Badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

- 16 Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional;
- 17 Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya serta pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;
- 18 Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 19 Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama;

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap warga Kabupaten Sijunjung yang beragama Islam yang mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang telah berkewajiban menunaikan Zakat.
- (2) Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Lembaga Pemerintahan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Instansi Vertikal, Karyawan BUMD dan Perusahaan Swasta dengan penghasilan yang telah memenuhi nisab wajib membayarkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sijunjung, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

3. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten Sijunjung, bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
- (2) BAZNAS Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten Sijunjung menjalankan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Kabupaten.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7a dan pasal 7b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7 a

- (1) BAZNAS Kabupaten Sijunjung terdiri dari unsur Pimpinan, Pelaksana dan Satuan Audit Internal.
- (2) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satu Orang Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Satu Orang Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Satu Orang Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Satu Orang Wakil Ketua Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Bupati Sijunjung;
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai pemerintah Daerah dan pegawai Kementerian Agama yang di perbantukan.
- (8) Susunan organisasi, tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana di atur dalam peraturan BAZNAS Kabupaten Sijunjung dengan mempedomani Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan BAZNAS;
- (10) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sijunjung.

Bagian ketiga
Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan
BAZNAS Kabupaten Sijunjung
Pasal 7b

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7a ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi Ulama, Tenaga Profesional, dan Tokoh Masyarakat Islam.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. beragama islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berakhlak mulia;
 - e. berusia minimal 40 (empat puluh)tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kopetensi di bidang pengelolaan zakat;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten Sijunjung;
- (3) Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung dilaksanakan setelah melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim dan mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Republik Indonesia;
 - (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, MUI, Organisasi Masyarakat Islam, Tokoh Masyarakat dan Akademisi,
 - (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habis masa jabatan;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus; atau
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung
 - (6) Pimpinan yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
 - (7) Untuk mengisi kekosongan terhadap Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS pengganti atas usul Ketua BAZNAS Kabupaten Sijunjung setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Republik Indonesia.
 - (8) Calon pengganti pimpinan BAZNAS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari unsur yang sama dengan yang digantikan.
 - (9) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BAZNAS Kabupaten Sijunjung melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten.
 - b. Kantor instansi Vertikal tingkat Kabupaten.
 - c. Kecamatan
 - d. Nagari/Desa
 - e. Badan usaha milik daerah Kabupaten.
 - f. Perusahaan swasta skala Kabupaten.
 - g. Mesjid, musalla, langgar, surau, atau nama lainnya.
 - h. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung dijabat selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan;

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ dibentuk melalui keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Sijunjung;
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu mengumpulkan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten Sijunjung

8. Ketentuan pasal 13 diubah dan di tambah 1(satu) ayat sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung dengan cara:
 - a. Menerima atau mengumpulkan dari muzaki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.
 - b. BAZNAS dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan atau Pihak Ketiga lainnya dalam pengumpulan zakat harta muzaki.
- (2) Muzaki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Sijunjung untuk menghitungnya;
- (4) BAZNAS Kabupaten Sijunjung wajib menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi Muzaki yang telah membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
- (5) BAZNAS Kabupaten Sijunjung wajib menerbitkan Bukti Setoran Zakat (BSZ) sebagai tanda terima atas zakat yang diterima, dan menerbitkan daftar donasi dalam bentuk rekening koran muzaki;
- (6) Bukti Setoran Zakat (BSZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat, dan nomor pengesahan lembaga BAZNAS;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) muzaki
 - d. jumlah dan jenis zakat yang dibayarkan dalam angka dan huruf, serta mencantumkan tahun haulnya; dan
 - e. nama, tandatangan petugas penerima, dan tanggal penerimaan serta stempel BAZNAS Kabupaten Sijunjung.

- (7) Bukti Setoran Zakat (BSZ) tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - a. Lembar kesatu warna putih diberikan kepada Muzaki.
 - b. Lembar kedua menjadi Arsip BAZNAS;
 - c. Bukti setoran melalui rekening yang di keluarkan oleh Bank mitra BAZNAS dapat di laporkan kepada BAZNAS untuk di terbitkan Bukti Setor Zakatnya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (3) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (4) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BAZNAS;

10. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten Sijunjung dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan data base yang dimiliki BAZNAS;
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Data Base BAZNAS Kabupaten Sijunjung.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran kegiatan BAZNAS Kabupaten Sijunjung bersumber dari dana APBD dan dana zakat bagian Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran operasional BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk anggaran kegiatan BAZNAS Kabupaten Sijunjung dianggarkan sebesar 10% dari jumlah dana yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung tahun sebelumnya dan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung setiap tahun.
- (4) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (5) Biaya Operasional BAZNAS Kabupaten Sijunjung yang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :
 - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung
 - b. Biaya Administrasi Umum
 - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi
- (6) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Hak Amil.
- (7) Besaran dan penggunaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat islam dan dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BAZNAS Kabupaten dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efesiensi dalam pengelolaan zakat.
- (8) Ketentuan mengenai Hak keuangan pimpinan dan biaya operasional BAZNAS Kabupaten Sijunjung yang di biayai dari APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap BAZNAS dilakukan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Inspektorat Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.
- (3) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS, Satuan Audit Internal dapat meminta bantuan Akuntan Publik;
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan BAZNAS;

13. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.
- (2) BAZNAS memberikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik

14. Ketentuan BAB XIV pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
Ketentuan Pidana
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat, melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kejahatan
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Juni 2015
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina IV/a

NIP. 19710705 199803 1 011

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung untuk mewujudkan masyarakat Sijunjung yang madani, Pemerintah Daerah dan masyarakat telah berupaya melaksanakan pembangunan baik dibidang fisik, maupun secara mental dan spritual keagamaan sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan rasa keadilan dikalangan masyarakat kurang mampu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melaksanakan pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber dana yang potensial untuk mengurangi angka kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang baru sehingga terciptanya pengalolaan zakat yang memiliki nilai daya guana bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan evektifitas dan efesiensi peleyanan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Penyelenggara lembaga Pemerintahan adalah seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung yang penghasilannya bersumber dari APBD maupun APBN.

Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) merupakan nomor unik yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung kepada para muzaki sebagai nomor registrasi dan identitas muzaki

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Kebijakan BAZNAS merupakan peraturan yang di terbitkan oleh BAZNAS Pusat, dan atau BAZANAS Provinsi Sumatera Barat dan atau BAZNAS Kabupaten Sijunjung

Ayat (3)

Huruf e

Perwakilan LAZ adalah pembukaan perwakilan baru LAZ yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional dari Pemerintah

Pasal 7a

cukup jelas

Pasal 7b

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Huruf e

Pemberhentian Pimpinan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung dilakukan apabila :

- a. Berpindah domisili;
- b. berpindah Agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmanidan/rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

- Ayat (8)
cukup jelas
- Ayat (9)
cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Huruf b
Yang dimaksud dengan Lembaga keuangan dan pihak ketiga lainnya adalah berupa BANK, Koperasi dan Badan hukum Lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan.
- Ayat (2)
cukup jelas
- Ayat (3)
cukup jelas
- Ayat (4)
cukup jelas
- Ayat (5)
cukup jelas
- Ayat (6)
cukup jelas
- Ayat (7)
cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
cukup jelas
- Ayat (2)
cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.
- Ayat (4)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- Ayat (5)
cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas